

Peran Kantor Jasa Akuntan Dalam Peningkatan Kualitas Informasi BLUD Puskesmas

**Kamila¹, Annisa Putri Ramadhani², Lia Eriska Br.Sitepu³,
Muhammad Angga Reksa⁴, Putri Faradilla⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

kamila@uinsu.ac.id¹, annisaputriramad@gmail.com², liaeriskasitepu36@gmail.com³
putrifaradillasa@gmail.com⁴, anggareksa123@gmail.com⁵

ABSTRACT

Health development is aimed at increasing the highest degree of public health. District Health Center is a spearhead health service facility. The implementation of health services requires the management of integrated, sustainable health centers to produce effective and efficient health center performance in the form of human resources, infrastructure and budgets with the Implementation of Financial Management of Regional Public Service Agencies (BLUD). The problem in this research is the lack of effective application of financial management of the Regional Public Service Agency (BLUD) District Health Center, Bandung in improving service performance, Health Service variables in Performance Assessment are still in sufficient category. The implementation of the BLUD Financial Management Pattern can be said to be effective if it has fulfilled eight criteria in measuring the effectiveness of a program in accordance with Siagian's theory, namely: clarity of purpose, clarity of strategy to achieve goals, steady analysis and policy formulation, careful planning, proper programming, availability facilities and infrastructure activities, effective and efficient implementation, supervision and control.

Keywords: Health Services, BLUD Financial Management

ABSTRAK

Pembangunan kesehatan ditunjukkan untuk melihat tingkatan dari kesehatan warga yang maksimal. Puskesmas merupakan sarana jasa kesehatan yang sangat berguna bagi masyarakat dan juga sebuah jasa kesehatan yang dominan membantu masyarakat di pedesaan. Penerapan jasa kesehatan menginginkan manajemen puskesmas yang terstruktur, serta berkelanjutan supaya menciptakan kemampuan puskesmas yang efisien serta berdaya guna berbentuk pangkal energi orang, alat infrastruktur serta perhitungan dengan Aplikasi Pengurusan Finansial Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kasus dalam riset ini ialah membahas mengenai kurang efektifnya aplikasi manajemen finansial Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas dalam meningkatkan kemampuan jasa puskesmas, elastis Jasa Kesehatan dalam Evaluasi Kemampuan Puskesmas sedang kategori lumayan. Aplikasi Pola Pengurusan Finansial BLUD dapat terbilang efisien bila sudah memenuhi 8 patokan dalam mengukur daya guna sesuatu program cocok dengan teorinya Siagian ialah: kejelasan tujuan, kejelasan strategi pendapatan tujuan, Cara analisa serta formulasi kebijaksanaan yang afdal, pemograman yang matang, kategorisasi program yang pas, tersedianya alat serta infrastruktur aktivitas, penerapan yang efisien serta berdaya guna, pengawasan serta pengaturan.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Keuangan BLUD

PENDAHULUAN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) selaku eksekutor jasa khalayak dibidang kesehatan dikala ini belum bias memenuhi impian warga. Dalam riset yang dilakukan oleh Lintin B, kerap kali administrasi yang rumit merupakan sebuah dampak yang timbul dari sulitnya birokrasi hal ini merupakan salah satu perihal yang kerap dikeluhkan oleh warga. Perihal yang melandasi jasa khalayak ramai belum dapat memenuhi kemauan warga yang termasuk kedalam konsumennya dikarenakan pola pengurusan perhitungan pada badan khalayak yang mengarah keluar kurang baik.

Berbagai macam usaha kenaikan mutu jasa khalayak telah dicoba diisyaratkan dengan dikeluarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 mengenai Prinsip Teknis Pengurusan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Aplikasi PPK- BLUD pada Bagian Kegiatan Puskesmas, wajib penuhi persyaratan kata benda, teknis serta administratif. Setelah penuhi persyaratan itu Puskesmas yang hendak jadi BLUD wajib menyiapkan Aturan Mengurus, sanggup melakukan konsep strategi bidang usaha (RSB) serta mempraktikkan standar jasa minimal (SPM) dari bagian kegiatan.

Tanggungjawab finansial dalam wujud informasi finansial menjadi peranan yang wajib dilakukan oleh BLUD puskesmas. Tidak hanya itu, informasi finansial bermaksud untuk menyuguhkan data yang bermanfaat dalam membuat serta menilai ketetapan hal dalam kemampuan yang bias dilakukannya. Sebab seperti itu, BLUD puskesmas berupaya dapat menciptakan informasi finansial yang bermutu.

Mutu informasi finansial BLUD puskesmas pula mempunyai ketergantungan dalam pandangan akurasi durasi. Hingga tahun perhitungan 2018, Biro Kesehatan yang membawahi BLUD puskesmas jadi salah satu biro yang menghadapi keterlambatan dalam perihal pengumpulan informasi finansial.

Terdapat 3 ketentuan penting yang wajib dipadati oleh sesuatu lembaga supaya bisa berkedudukan BLUD. Bagi Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2005 artikel 4 mengenai pengurusan finansial BLU mengatakan sesuatu dasar kegiatan lembaga penguasa bisa diizinkan mengatur finansial dengan PPK BLU bila penuhi persyaratan kata benda, teknis, serta administratif. Syahril (2013) menarangkan terpaut persyaratan itu, dimana persyaratan kata benda terpaut dengan penajaan layanan biasa, persyaratan teknis terpaut dengan kemampuan jasa serta kemampuan finansial, dan persyaratan administratif terpaut dengan terpenuhinya akta semacam pola aturan mengurus, konsep penting bidang usaha, standar layanan minimum, informasi finansial utama, serta informasi audit atau mau buat diaudit.

Puskesmas mempunyai tanggung jawab peliputan terhadap Biro Kesehatan pada Kabupaten setempat. Dan mempunyai tanggung jawab dalam pengecekan oleh Inspektorat, Badan Interogator Finansial serta Kantor Akuntan Khalayak. Perihal itu buat melaporkan kebiasaan informasi finansial yang dihidangkan sudah cocok dengan ketentuan yang legal. Informasi finansial yang dimaksudkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO),

Laporan Arus Kas(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat menjelaskan serta memberikan deskripsi yang lebih detail tentang suatu kejadian atau fenomena (Priyono,2016:37). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dari suatu proses atau membentuk sebuah kategori atau pola (Priyono, 2016: 37). Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk meneliti terkait permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat serta bagaimana tata cara yang digunakan dalam masyarakat pada kondisi tertentu. Selain itu, penelitian deskriptif juga mempelajari tentang hubungan, pandangan, sikap, kegiatan, serta proses yang sedang terjadi maupun dampak yang ditimbulkan dari adanya sebuah fenomena tertentu.

Populasi dalam riset ini merupakan semua puskesmas yang terdapat. Sebaliknya yang jadi ilustrasi dalam riset ini merupakan Puskesmas yang telah berpindah status jadi BLUD serta memakai SIA BLUD. Buat menggantikan ilustrasi, diseleksi responden riset dengan pendekatanpurposive sampling on respondent. Patokan yang dipakai merupakan responden wajib ialah Staff akuntansi ataupun finansial Puskesmas yang sudah berkedudukan BLUD serta menggunakan SIA BLUD dalam pengurusan keuangannya. Patokan ini terbuat supaya responde selaku perwakilan ilustrasi yang dipakai dalam riset cocok dengan tujuan riset ini sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi Yuliani(2010) guna bisa menciptakan informasi finansial yang bermutu hingga mutu banyak orang yang melakukan kewajiban dalam menata informasi finansial wajib jadi atensi penting ialah para karyawan yang ikut serta dalam kegiatan itu wajib paham serta menguasai gimana cara serta penerapan akuntansi itu dijalani dengan berdasar pada determinasi yang legal. Ada pula cara atau daur akuntansi finansial zona khalayak bagi Bastian(2010: 318) merupakan selaku selanjutnya:

1. **Bisnis**
Bisnis merupakan persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam perihal ini, bisnis yang diartikan merupakan bisnis antara badan zona khalayak serta pihak lain. Transaksi- transaksi inilah yang esoknya hendak dikabarkan dalam informasi finansial badan.
2. **Analisa fakta bisnis**
Dalam tiap bisnis senantiasa diiringi dengan fakta pendukung yang bermuatan data mengenai aktivitas bisnis itu. Dari fakta bisnis inilah setelah itu dianalisis serta dipakai selaku bawah pencatatan.
3. **Menulis Informasi**
Bisnis Semacam yang sudah dipaparkan di atas, dari analisa fakta bisnis itu hendak dicoba pencatatan atas bisnis yang sudah terjalin. Pencatatan informasi bisnis dicoba oleh bendaharawan dalam harian.

4. Membagi serta Mengikhtisarkan Informasi yang Dicatat(Posting)

Dalam novel besar ada catatan julukan golongan akun yang terdapat pada sesuatu badan. Bersumber pada julukan akun yang terdapat, memo atas bisnis itu dikelompokkan cocok dengan namanya tiap- tiap. Perihal inilah yang diucap dengan posting.

5. Publikasi Informasi serta Catatannya

Sepanjang satu rentang waktu akuntansi, bisnis dicatat serta dikelompokkan ke dalam novel besar serta setelah itu, bersumber pada memo itu, dibuatlah informasi finansial yang hendak di informasikan pada pihak- pihak yang bersangkutan. Informasi finansial zona khalayak yang sudah disusun itu setelah itu dianalisis buat memperhitungkan bukti serta reliabilitasnya.

Pangkal anggaran pada Puskesmas bisa berawal dari BLUD serta dari Bantuan Kesehatan (BOK). Dorongan Operasional Kesehatan cocok dengan Peraturan Menteri kesehatan No 11 tahun 2015 mengenai Petunjuk teknis Dorongan Operasional Kesehatan ialah dorongan penguasa pusat pada penguasa wilayah buat mensupport aktivitas operasional di dalam puskesmas. Sistem peliputan finansial yang dipakai pula mempunyai perbandingan serta bertanggung jawab pada pihak yang berlainan. Sistem data akuntansi yang dipakai pada Puskesmas memakai sistem yang dikenal Pahlawan, yang bermaksud dalam cara penginputan hendak memudahkan. Setelah itu sistem pencatatan asset wilayah pada Puskesmas memakai SIMBADA. Sistem itu berintegrasi alhasil menghasilkan informasi finansial bisa lebih berdaya guna serta efisien dalam penerapannya.

Puskesmas selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai tujuan buat melaksanakan tiap jasa dengan cara biasa dengan lebih berdaya guna, efisien, murah, tembus pandang serta bertanggung jawab cocok dengan prinsip kesamarataan, kepantasan, khasiat searah dengan aplikasi bidang usaha yang segar serta menolong Penguasa dalam menggapai tujuannya. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) cocok dengan Peraturan Menteri Dalam Negara No 79 Tahun 2018, pada bagian peliputan finansial pada Tubuh Layanan Biasa Wilayah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan perubahan ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSal), Laporan Arus Kas(LAK) serta Memo atas Informasi Finansial.

Riset yang dicoba oleh Suryono serta Sugiri(2017) melaporkan kalau dalam informasi finansial sedang ada terdapatnya perbandingan pengelompokan bobot bersumber pada guna mewajibkan pengelompokan bobot dalam bobot layanan serta bobot biasa administrasi, serta penyajian akun gelondongan atas bayaran dari pemakaian pemasukan jasa. Setelah itu Penyajian bayaran pada pos besar tidak bisa dihindarkan sebab akibat dari elastisitas BLUD dalam penganggaran. Bayaran yang digabungkan dalam pos besar dapat ditangani dengan merincikan bayaran dalam perhitungan dengan akibat kurang elastisitas yang didapat BLUD.

Informasi realisasi perhitungan serta informasi operasional disusun oleh Bagian Eksekutif Teknis Biro atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terkini dibangun serta hendak mempraktikkan BLUD cocok dengan sistem pemograman serta penganggaran yang diaplikasikan oleh penguasa wilayah. Informasi audit

terakhir ialah informasi audit oleh interogator eksternal penguasa yang dicocokkan dengan determinasi peraturan perundang-undangan atas informasi finansial tahun terakhir saat sebelum Bagian Eksekutif Teknis Biro atau Badan yang hendak mempraktikkan BLUD.

Untuk lembaga rezim yang sedang memakai aplikasi akuntansi konvensional, pergantian lembaga rezim jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pula diiringi dengan pergantian akuntabilitas serta transparansi (Prakoso, 2014). Pergantian akuntabilitas serta transparansi selaku akibat dari pergantian lembaga rezim jadi BLUD wajib bisa diamati dari pergantian sistem perakuntansian, yang awal berplatform kas jadi berplatform akrual, dan penganggaran konvensional jadi penganggaran berplatform kemampuan. Hendak namun, pada Puskesmas X belum ditemui terdapatnya usaha perintisan atau perencanaan mengarah pergantian yang diharapkan dalam perihal perakuntansian. Maksudnya, situasi sistem perakuntansian Puskesmas X dikala ini sedang memakai aplikasi konvensional.

Situasi perakuntansian Puskesmas X yang memakai aplikasi konvensional itu teridentifikasi dari statment "... jadi buat membuat sasaran betul berarti itu satu tahun itu kita berdasar dengan tahun- tahun yang tadinya..." (AK. 9), "... esok itu Juni itu membuat perhitungan (RKA) buat tahun 2018, kita membuat dari puskesmas sendiri. Trus asalnya dari mana, betul cocok dengan pemasukan yang tahun yang telah lalu kemarin buat barometer betul..." (AK. 9), serta "... Nah kerap itu Biro pertanyaan ke aku" program iki kenapa metu maneh mbak?", betul aku jawab saja lek itu kan program dasare jadi terdapat lagi. Lek tak gitu betul tidak jawab programe tahun kemudian belum berakhir" (AK. 10). Bersumber pada pernyataan- pernyataan di atas, perhitungan yang dipakai Puskesmas X dikala ini ialah perhitungan inkremental. Perhitungan inkremental ialah sistem penganggaran dengan memakai perhitungan tahun tadinya selaku bawah pembuatan perhitungan, setelah itu dicoba pergantian kecil di dalamnya (Syarifuddin, 2003). Oleh karena ciriciri itu, hingga perhitungan inkremental dikategorikan selaku perhitungan konvensional (Mardiasmo 2004).

Semacam yang dikatakan oleh informan DW, apabila industri memakai pelayanan KJA, hingga hendak memperoleh khasiat antara lain: Industri tidak butuh lagi merekrut pegawai atau staff di bagian akuntansi alhasil sanggup kurangi bayaran; Industri hendak lebih aman sebab Informasi Keuangannya digarap oleh seseorang akuntan handal; Untuk Industri hingga bayaran yang dikeluarkan lebih kecil dibanding dengan lingkup profesi yang dicoba; Dari bagian kerahasiaan Industri hendak elbih aman apabila digarap oleh akuntan handal serta bebas alhasil terbebas dari bentrokan kebutuhan yang menghindarkan industri dari praktek- praktek ketakjujuran; Owner ataupun dewan hendak lebih fokus dalam mempertimbangkan strategi industri; KJA hendak membagikan pemecahan pada industri dalam wujud sharing knowledge sebab KJA mempunyai para pakar di bermacam bidangnya.

Ada pula angka imbuh (value added) yang melainkan output Pelayanan Tipe KJA dengan yang lain ialah: KJA diawasi oleh Kementerian Finansial (P2PK) serta Federasi yang menaunginya dalam perihal ini IAI; KJA mempunyai Sistem Pengaturan Kualitas buat melindungi kredibilitasnya; KJA bisa jadi Center of Knowledge Literasi Akuntansi untuk UMKM; Mempermudah Pengaudit buat melaksanakan Audit;

Mempermudah pembaca informasi finansial buat menafsirkan serta menyamakan informasi finansial entitas yang berlainan; Mempermudah kategorisasi Informasi Finansial.

Dengan memakai pelayanan Kantor Pelayanan Akuntan, industri yang sepanjang ini menulis aktivitas upaya ala kadarnya serta tidak komplis, sehabis memakai pelayanan dari Kantor Pelayanan Akuntan, hingga industri bisa mendapatkan cerminan aktivitas upaya industri dengan cara cermat. Alhasil hendak mempermudah untuk industri buat analisa arus kas serta mungkin pemodal di era yang hendak tiba.

Bagi Widyantoro(2009), kedatangan NPM pengaruhi rancangan perhitungan sesuatu negeri, ialah mengakibatkan pergantian sistem perhitungan dari perhitungan konvensional jadi perhitungan yang lebih mengarah kemampuan. Oleh sebab itu, BLUD selaku konkretisasi dari NPM di Indonesia menginginkan pemakaian perhitungan berplatform kemampuan(Permendagri Nomor 61 Tahun Tahun 2007). Perihal ini menimbulkan tiap lembaga rezim yang sedang memakai perhitungan inkremental, tercantum Puskesmas X, bila jadi BLUD sepatutnya harus meninggalkan aplikasi pemakaian perhitungan inkremental serta berpindah ke pemakaian perhitungan berplatform kemampuan.

Perhitungan yang mengarah kemampuan ataupun yang biasa diketahui selaku perhitungan berplatform kemampuan(performance based budgeting) dengan cara prinsip mengaitkan pengeluaran negeri dengan hasil yang mau dicapai oleh penguasa(output atau outcome)(Sancoko dalam Widyantoro, 2009: 2). Maksudnya, kategorisasi, ulasan, penentuan hingga pengawasan penerapan perhitungan tidak lumayan dengan cuma memandang besar kecilnya perhitungan yang ialah masukan, tetapi pula wajib mencermati kemampuan perhitungan itu yang mencakup capaian kemampuan, keluaran, hasil serta khasiat dan pas tidaknya golongan target aktivitas yang dibiayai perhitungan mulanya(Natsir dalam Kurrohman, 2013: 2). Hingga dengan sedemikian itu tiap rupiah yang dikeluarkan nyata penggunaannya serta bisa dipertanggungjawabkan. Perihal ini pula yang jadi alibi dibalik BLUD mengharuskan pemakaian perhitungan berplatform kemampuan dibandingkan perhitungan konvensional semacam perhitungan inkremental. Perhitungan inkremental selaku pendekatan perhitungan yang dipakai oleh Puskesmas X dikala ini, memanglah gampang dicoba serta bisa terbuat dengan kilat sebab memakai perhitungan tahun tadinya yang diganti ataupun dicocokkan, namun perhitungan ini mempunyai sebagian kelemahan. 3 kelemahan perhitungan inkremental di antara lain merupakan 1) kurang menekankan pada output yang akan dicapai(Kurrohman, 2013), 2) mengirim permasalahan tahun perhitungan tadinya ke tahun perhitungan selanjutnya(Abdullahi dalam Adah serta Mamman, 2013), serta 3) kurang mendesak badan buat membuat program ataupun kegiatan terkini buat menilai pangkal energi dari program yang terdapat(Budget Bentuk Review Committee of Wisconsin University, 2014). Kelemahan kelemahan itu nyata berlawanan dengan prinsip BLUD yang menjunjung kemampuan, efektifitas, daya produksi.

Informasi Finansial yang disusun wajib dicocokkan dengan standar akuntansi rezim. Standar akuntansi rezim tidak menata tipe upaya yang dicoba oleh BLUD.

Alhasil dibutuhkan buat mempraktikkan dalam kebijaksanaan akuntansi. Informasi finansial yang terbuat oleh BLUD diharuskan buat di audit oleh interogator dari pihak eksternal penguasa. Sesuai dengan hukum dalam pengaudit eksternal merupakan BPK. Pengecekan yang dicoba oleh BPK mencakup pengecekan informasi finansial, pengecekan kemampuan serta pengecekan dengan tujuan khusus. Pengecekan finansial merupakan pengecekan informasi finansial yang didasarkan atas fakta pendukung alhasil mempunyai agama yang mencukupi kalau informasi finansial sudah dihidangkan dengan cara alami dalam seluruh perihal yang material cocok dengan prinsip akuntansi yang legal di Indonesia. Pada pengecekan kemampuan merupakan pengecekan atas pengurusan finansial negeri yang mencakup pandangan kemampuan, daya guna serta ekonomi. Serta pada pengecekan buat tujuan khusus merupakan yang mempunyai ketergantungan dengan ciri dalam pengecekan pada pengecekan finansial serta pengecekan analitis.

Kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas. Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kedua (H4) yaitu Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan Karena nilai t hitung $>$ t tabel ($2,207 > 2,045$), maka H4 diterima. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $<$ 0.05 maka H4 diterima, dan jika signifikansi $>$ 0.05 maka H4 ditolak. Karena signifikansi pada uji t kurang dari $0,05$ ($0,035 < 0,05$) maka H4 diterima. Jadi, dapat diperoleh nilai t hitung sebesar $2,207$ dengan nilai signifikansi $0,035$. Hal ini berarti, dengan meningkatnya kompetensi staf akuntansi maka akan meningkat pula kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas (Anggraeni: 2019).

Dalam permendagri Nomor 79 tahun 2018 dengan cara akurat dipaparkan kalau pengaudit dalam BLUD merupakan dasar pengawas dalam. Dasar pengawas dalam mempunyai kewajiban selaku selanjutnya:

1. Penjagaan harta kekayaan
2. Menghasilkan ketepatan sistem data keuangan
3. Menghasilkan kemampuan serta produktivitas
4. Mendesak dipatuhinya kebijaksanaan manajemen dalam aplikasi praktek bidang usaha yang segar.

Dasar pengawas dalam itu dibangun oleh Arahan buat pengawasan serta pengaturan dalam kepada kemampuan jasa, finansial serta akibat area sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bidang usaha Yang Segar serta berada langsung dibawah arahan BLUD.

Puskesmas yang mempraktikkan standar abdi pada Tubuh Layanan Biasa Wilayah cocok dengan Permendagri No 79 Tahun 2018. Jenjang dini pada uraian bidang usaha konsumen merupakan dengan Evaluasi resiko. Pada evaluasi resiko di Puskesmas merupakan melaksanakan pengecekan akun yang beresiko semacam: (1) resiko kepada bekal obat- obatan, sebab membolehkan terbentuknya terdapatnya obat yang kadaluarsa tetapi sedang tersembunyi serta sedang diperjualbelikan pada warga, (2) Resiko Piutang BPJS yang mempunyai angka material serta belum dilunasi oleh pihak BPJS, (3) pemasukan pada Puskesmas, bagus pemasukan dari

BLUD, ataupun pemasukan dari jasa kesehatan serta (4) bobot operasional, yang membolehkan terdapatnya bobot operasional yang delusif.

Berikutnya merupakan determinasi materialitas audit. Materialitas ialah besarnya angka yang dihilangkan ataupun salah hidangan data akuntansi, yang diamati dari situasi informasi finansial di dalamnya, ataupun bisa menyebabkan pergantian atas ataupun akibat kepada estimasi orang yang menaruh keyakinan kepada data itu, sebab terdapatnya penghilangan ataupun salah hidangan itu. Materialitas jadi suatu estimasi handal seseorang pengaudit dalam membagikan suatu evaluasi. Determinasi materialitas dipecah jadi 2, ialah materialitas dengan cara totalitas(overall materiality) serta materialitas kemampuan(performance materiality). Pada overall materiality ditetapkan persentase sebesar 2% dari keseluruhan pemasukan ataupun 2% dari keseluruhan peninggalan yang dipunyai. Setelah itu pada performance materiality ditetapkan sebesar 75% dari hasil performance materiality. Pemograman lain ataupun pengecekan audit lebih lanjut menginginkan strategi audit yang dicoba dengan cara global. Pengecekan dengan lebih global dicoba dengan tingkatkan skeptisme handal, penunjukan watak audit, pengontrolan yang dicoba dengan cara berkepanjangan, determinasi metode audit yang dicoba serta metode audit lebih lanjut dengan pengecekan pada selisih akun.

Pengecekan audit berikutnya merupakan pada akun bobot, bagus pada bobot berbelanja modal serta berbelanja operasional. Pengecekan yang dicoba bisa diawali catatan bobot yang dipunyai setelah itu diturunkan pada fakta yang dipunyai. Alhasil bisa dibuktikan kalau fakta yang dipunyai sudah menggantikan nilai yang terdapat pada informasi finansial. Bila fakta sudah cocok hingga bisa disimpulkan kalau tidak terdapatnya bobot dengan cara fantasi atas pengeluaran yang dicoba. Perihal itu pula bisa dimintakan fakta dari bendaharawan pengeluaran dalma wujud informasi kegiatan.

Pada audit Puskesmas dengan cara biasa tidak material, dalam arti mempunyai informasi finansial yang lumayan bagus. tetapi terdapat penemuan dengan angka yang tidak material ialah pada pengakuan pinjaman BPJS. Pinjaman itu merupakan pinjaman antara pegawai Puskesmas kepada pembayaran BPJS yang dijamin oleh donatur kegiatan(Puskesmas) sebesar 4% serta 1% dijamin oleh pegawai dengan cara individu. Tetapi di dalam UndangUndang No 24 Tahun 2011 mengenai Tubuh Eksekutor Agunan Sosial melaporkan kalau bobot iuran BPJS diselenggarakan oleh program agunan kesehatan, yang mempunyai guna buat menyambut registrasi, mengakulasi serta memungut iuran dari partisipan serta donatur kegiatan dan mengatur anggaran Agunan Sosial buat kebutuhan partisipan. Setelah itu pada artikel 19 melaporkan kalau pemberika kegiatan mempunyai peranan buat memungut iuran yang jadi bobot donatur kegiatan serta menyetorkan pada BPJS. Kesesuaian pada pengakuan pinjaman BPJS pula dicoba pengecekan alhasil tidak terdapat bisnis yang terjalin sehabis bertepatan pada neraca, cocok dengan asersi pisah batasan(*cut off*) serta keakuratan(*accuracy*).

Terpaut dengan besaran yang wajib dibayarkan oleh donatur kegiatan serta partisipan BPJS ada di dalam Peraturan Kepala negara No 75 tahun 2019 mengenai Pergantian atas Peraturan Kepala negara no 82 tahun 2018 Agunan

Kesehatan, khususnya pada artikel 30 dengan determinasi pada pegawai Puskesmas sebesar 5%, dimana 4% jadi peranan pembayaran oleh donatur kegiatan serta 1% oleh partisipan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas, maka Komunikasi pada pelaksanaan PPK-BLUD Puskesmas dalam keadaan baik dengan didukung adanya sosialisasi serta koordinasi bersama baik oleh pihak internal puskesmas maupun eksternal yaitu Dinas Kesehatan.

Dengan terdapatnya Kantor Jasa Akuntan(KJA), hingga Informasi Finansial sesuatu industri bisa dihidangkan cocok dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) alhasil bisa membagikan cerminan atau data yang betul pada owner industri. KJA pula menolong dalam peliputan perpajakan. Dengan terdapatnya KJA hingga Informasi Finansial yang diperoleh hendak memantulkan kondisi yang sebetulnya, alhasil hendak bebas dari ganjaran perpajakan.

Penerapan PPK-BLUD Puskesmas menunjukkan bahwa sumber daya manusia mencukupi dari segi kuantitas, tetapi sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menerapkan PPK-BLUD. Disposisi pelaksana pada pelaksanaan PPK-BLUD di puskesmas tinggi yaitu menyetujui adanya penerapan kebijakan PPK-BLUD pada puskesmas. Struktur birokrasi pada pelaksanaan PPK-BLUD Puskesmas di Kota Mojokerto dalam keadaan baik yang didukung dengan telah tersedianya SOP pelaksanaan PPK-BLUD yang disosialisasikan kepada seluruh pegawai puskesmas.

Pelaksanaan PPK-BLUD Puskesmas belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan belum semua fleksibilitas sebagai keistimewaan yang dimiliki oleh unit kerja puskesmas yang telah menerapkan PPK-BLUD dapat dirasakan oleh puskesmas.

Saran

Disarankan dalam mengatasi permasalahan merupakan Sistem manajemen birokrasi semacam pemograman, pengorganisasian, penerapan, dan pengaturan pengurusan finansial hendaknya diperbaiki bersumber pada akar dari prinsip regulasi paling utama buat eksekusi pembiayaan.

Baik nya jika puskesmas hendaknya dicocokkan dengan kebijaksanaan Peraturan Menteri dalam Negara yang terkini no 79 tahun 2018 dimana dengan cara akurat tidak terdapat pemaparan mengenai pencampuran sebagian Puskesmas(SKPD) jadi satu PPK- BLUD.

Hendaknya pada tiap- tiap Puskesmas supaya tidak hadapi kesusahan dalam mengatur serta memploting finansial, alhasil dengan terdapatnya sistem pencampuran ini (holding) bisa mempunyai elastisitas lebih besar dalam perihal: rekrutasi karyawan BLUD, utilisasi finansial BLUD dan dengan Sistem holding ini bisa tingkatkan output kemampuan pada kenaikan layanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adah, A. & Mamman, A. 2013. Assessing the Performance of Incremental Budgeting System in the Nigerian Public Tertiary Institutions. *European Journal of Business and Management*, 5 (5): pg. 100-108
- Anggreini, Mega. 2019. *Pengaruh Penerapan Psap 13, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Blud Puskesmas [Skripsi]*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga
- Clarissa, Vanya & Mangoting, Yenni. 2013. Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepuasan Klien Di Surabaya. *Tax & Accounting Review Vol 3, No. 2*.
- Hartono, J dan Abdillah, W. 2014. *Sistem Tata kelola Teknologi Informasi*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Hartono, J. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Indrayathi, P.A., Listyowati, R., Nopiyani, N.M.S., dan Ulandari, L.P.S. 2014. "Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan yang Berstatus Badan Layanan Umum Daerah". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 9, No. 2*.
- Kurrohman, T. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value for Money di Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi, 5 (1)*: hlm. 1-11.
- Lembaga Administrasi Negara. *Strategi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)*. Jakarta: LAN.
- Lintin B. 2011. *Analisis Kinerja Pelayanan pada puskesmas Batua Makassar [Skripsi]*. Universitas Hasanudin, Makassar.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri kesehatan Nomor 11 tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Kesehatan
- Prakoso, C.T. 2014. Eksistensi Badan Layanan Umum Ditinjau dari Perspektif New Institutional dan Principal Agent Theory. *eJournal Administratif Reform, 2 (4)*: 2422-2432.
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing
- Surianto, dan Trisnantoro, L. 2013. "Evaluasi Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Undata Propinsi Sulawesi Tengah". *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 02, No. 1*.
- Suryono, Eko & Sugiri, Slamet. 2017. *Analisis Atas Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah [Tesis]*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

- Syahril. 2013. "Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD DR. H. Moh. Anwar Sumenep". *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi Volume III, No.1*
- Syarifuddin. 2003. Model-Model Anggaran pada Organisasi Sektor Publik dan Perkembangannya. *Makalah disajikan dalam Seminar Bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, Agustus 2003.*
- Widyantoro, A. E. 2009. *Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomenologis (Studi Kasus pada Universitas Diponegoro)*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Yuliani, Syafrida. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal telaah dan riset akuntansi Vol 3 No 2: hlm. 206-220.*